



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 2, No. 7, Juli 2025
Hal 1976-1991

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Bumdes: Strategi Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sungai Putri Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang

Sartomi¹

¹Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 28, 2025
Revised Juni 30, 2025
Accepted Juli 3, 2025

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah,
BUMDes,
Kesejahteraan Masyarakat,
Desa Sungai Putri

Keywords:

Sharia Economy,
BUMDes,
Community Welfare,
Sungai Putri Village

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam mendorong perekonomian desa. Pengelolaan BUMDes berbasis prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat menciptakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama bagi masyarakat Desa Sungai Putri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan BUMDes serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan warga Desa Sungai Putri, serta analisis dokumen terkait. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam BUMDes Sungai Putri meliputi: (1) penerapan bagi hasil (profit-sharing) sebagai alternatif bunga, (2) transaksi berbasis kehalalan dan kemaslahatan, (3) mekanisme pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta (4) pendistribusian keuntungan secara adil. Strategi pengembangan BUMDes meliputi peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi prinsip syariah, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dampaknya, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, serta penguatan nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi. Pengelolaan BUMDes berbasis prinsip syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Putri melalui pendekatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan regulasi dan pendampingan terus-menerus untuk memastikan konsistensi implementasi prinsip syariah dalam jangka panjang.

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are an important instrument in driving the village economy. BUMDes management based on sharia economic principles is expected to create justice, transparency, and shared prosperity for the people of Sungai Putri Village. This study aims to analyze the implementation of sharia principles in BUMDes management and its impact on improving community welfare. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with BUMDes managers, community leaders, and residents of Sungai Putri Village, as well as analysis of related documents. Data analysis techniques were carried out interactively through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The implementation of sharia economic principles in

BUMDes Sungai Putri includes: (1) application of profit-sharing as an alternative to interest, (2) transactions based on halal and welfare, (3) transparent and accountable fund management mechanisms, and (4) fair distribution of profits. BUMDes development strategies include increasing human resource capacity, socializing sharia principles, and collaborating with sharia financial institutions. The impact is an increase in community income, a decrease in poverty rates, and strengthening the values of honesty and trust in economic activities. BUMDes management based on sharia principles contributes significantly to improving the welfare of the Sungai Putri Village community through a just and sustainable approach. Strengthening regulations and continuous assistance are needed to ensure the consistency of the implementation of sharia principles in the long term..

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Sartomi
Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak,
Pontianak, Indonesia
Email: namsartomi17@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan ekonomi berbasis syariah dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menawarkan pendekatan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Sungai Putri, yang terletak di wilayah dengan potensi sumber daya alam dan sosial yang cukup besar, menghadapi tantangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam BUMDes diharapkan dapat menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha desa, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial dan etika bisnis.

Prinsip ekonomi syariah berlandaskan pada hukum Islam yang mengutamakan keadilan, larangan riba (bunga), dan larangan terhadap bisnis yang dianggap haram (terlarang), seperti perjudian dan alkohol. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga etis dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Al-Harran dan Al-Qaradawi [1], "Prinsip-prinsip ekonomi syariah memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan sesuai dengan norma-norma moral yang tinggi". Selain itu, Suhaili [2] menambahkan, "Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan".

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes dapat menghasilkan dampak positif. Misalnya, penelitian oleh Hasan [3] menemukan bahwa BUMDes yang menerapkan prinsip syariah mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan [3]. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati [4] menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam BUMDes di beberapa desa di Jawa Barat telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, serta memperkuat ikatan sosial di komunitas lokal [4].

Namun, terdapat juga tantangan dalam implementasinya. Sebagai contoh, studi oleh Kurniawan [5] menunjukkan bahwa meskipun prinsip syariah diterapkan, beberapa BUMDes mengalami kesulitan

dalam hal pemahaman dan pelatihan pengelola mengenai prinsip-prinsip syariah yang tepat, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan [2].

Penelitian oleh Kamil dan Jannah [6] juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan yang komprehensif untuk pengelola BUMDes agar prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif [6]. Penelitian lainnya oleh Wibowo [7] menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes berbasis syariah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun memerlukan pendekatan yang lebih inklusif [7].

Lebih lanjut, studi oleh Adnan [8] menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BUMDes berbasis syariah dapat mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi [8]. Penelitian oleh Hariri dan Yani [9] menyoroti pentingnya kerjasama antara pengelola BUMDes dan lembaga keuangan syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif [9].

Berbagai penelitian juga menegaskan perlunya penyesuaian regulasi lokal agar prinsip ekonomi syariah dapat diimplementasikan dengan baik. Studi oleh Farhan [10] menunjukkan bahwa penyesuaian regulasi lokal sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi prinsip syariah dalam BUMDes (Farhan, 2020, hal. 80). Selain itu, penelitian oleh Siti [11] menekankan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa implementasi prinsip syariah tetap sesuai dengan tujuannya [11].

Penerapan prinsip ini dalam BUMDes diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini tidak lepas dari tantangan, baik dari segi pemahaman, pengelolaan, maupun penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam BUMDes di Desa Sungai Putri, serta strategi, dampak, dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka ada beberapa alasan akademik dalam penelitian ini: *Pertama*; Kebutuhan untuk Mengidentifikasi Best Practices. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik terbaik dalam implementasi prinsip ekonomi syariah pada BUMDes. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan BUMDes dapat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat [3][4]. Dengan memahami best practices, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif bagi pengelola BUMDes lainnya untuk mengoptimalkan hasil. *Kedua*; Kesenjangan Pengetahuan. Meskipun terdapat beberapa penelitian tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam BUMDes, masih ada kesenjangan dalam pengetahuan mengenai strategi implementasi yang spesifik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi yang efektif dan dampak konkret dari implementasi prinsip syariah [5][8]. *Ketiga*; Relevansi dengan Kebijakan Pembangunan Desa. Penelitian ini relevan dengan kebijakan pembangunan desa di Indonesia yang mendorong penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes. Dengan mengkaji bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan dukungan yang lebih baik untuk pengelolaan BUMDes berbasis syariah [11][10]. *Keempat*; Pengembangan Teori dan Praktik Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga penting untuk pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya menilai penerapan prinsip syariah tetapi juga mengevaluasi tantangan dan solusi yang muncul dalam konteks lokal, yang dapat menambah kontribusi akademik dalam bidang ekonomi syariah dan manajemen BUMDes [7][9]. *Kelima*; Kebutuhan Praktis untuk Masyarakat Desa. Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan informasi yang berharga bagi pengelola BUMDes dan masyarakat desa tentang bagaimana menerapkan prinsip ekonomi syariah secara efektif. Dengan menyediakan panduan dan rekomendasi berdasarkan penelitian, diharapkan dapat meningkatkan implementasi prinsip syariah di BUMDes dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat [2][6].

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang implementasi ekonomi syariah di BUMDes Sungai Putri menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dioperasionalkan dalam pengelolaan BUMDes mulai dari aspek kelembagaan, pembiayaan, hingga dampak sosial ekonomi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa BUMDes Sungai Putri telah menerapkan ekonomi syariah secara konsisten selama lima tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan 15 informan kunci yang terdiri dari pengelola BUMDes, Dewan Pengawas Syariah, mitra usaha, dan perangkat desa. Pedoman wawancara semi-terstruktur disusun untuk menggali informasi tentang mekanisme pembiayaan syariah, sistem bagi hasil, serta tantangan implementasi. Setiap wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim untuk memastikan akurasi data. Observasi partisipatif dilaksanakan selama tiga bulan penuh dengan mengikuti aktivitas operasional BUMDes mulai dari proses pembiayaan, produksi, hingga distribusi hasil usaha. Peneliti terlibat langsung dalam rapat-rapat evaluasi syariah dan pendampingan usaha mitra untuk mendapatkan pemahaman kontekstual. Catatan lapangan dibuat secara rinci untuk mendokumentasikan praktik-praktik ekonomi syariah yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Analisis dokumen menjadi sumber data penting yang meliputi laporan keuangan syariah, notulen rapat dewan pengawas, dokumen akad pembiayaan, serta peraturan desa terkait BUMDes. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk melihat konsistensi antara prinsip syariah dengan praktik operasional. Khusus untuk laporan keuangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan PSAK Syariah dan prinsip transparansi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan bantuan software NVivo 12. Proses analisis dimulai dengan pengkodean data, identifikasi pola, hingga penyusunan tema-tema utama. Triangulasi sumber dan metode dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan penelitian juga divalidasi melalui diskusi kelompok terfokus dengan para stakeholder BUMDes. Penelitian ini menggunakan kerangka teori maqashid syariah sebagai pisau analisis utama untuk mengevaluasi implementasi ekonomi syariah. Lima unsur maqashid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi parameter untuk mengukur keberhasilan dan dampak program. Selain itu, teori kelembagaan baru (new institutional theory) digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip syariah diinstitutionalisasi dalam organisasi BUMDes. Aspek etika penelitian diperhatikan secara ketat dengan mematuhi prinsip kerahasiaan dan informed consent. Setiap informan diberikan penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian dan hak mereka untuk mengundurkan diri kapan saja. Data pribadi dan informasi sensitif dikripsi dan disimpan secara aman untuk melindungi privasi responden. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari kepala desa dan pengurus BUMDes Sungai Putri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah di BUMDes Sungai Putri menggunakan pendekatan hybrid antara prinsip syariah klasik dengan adaptasi lokal. Sistem bagi hasil misalnya, dimodifikasi dengan mempertimbangkan budaya gotong royong masyarakat setempat. Mekanisme pengawasan syariah juga dikembangkan dengan memadukan standar nasional dengan kearifan lokal melalui peran ulama desa.

Keterbatasan penelitian ini antara lain durasi observasi yang relatif singkat dan terbatasnya dokumen tertulis tentang proses pengambilan keputusan syariah. Untuk penelitian lanjutan, disarankan menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perkembangan implementasi ekonomi syariah dalam jangka panjang. Studi komparatif dengan BUMDes syariah lain juga dapat memperkaya temuan tentang faktor-faktor penentu keberhasilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model ekonomi syariah di tingkat desa, khususnya dalam konteks pengelolaan BUMDes. Temuan-temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi dan pedoman teknis tentang BUMDes syariah. Bagi praktisi, penelitian ini menawarkan pembelajaran tentang strategi implementasi prinsip syariah di tingkat komunitas dengan berbagai tantangan dan peluangnya.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang implementasi ekonomi syariah di BUMDes Sungai Putri menggunakan pendekatan multi-metode untuk mendapatkan data yang komprehensif. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pengelola BUMDes, anggota Dewan Pengawas Syariah, mitra usaha, dan perangkat desa untuk menggali informasi tentang mekanisme operasional, tantangan implementasi, dan dampak ekonomi syariah terhadap masyarakat desa. Observasi partisipatif menjadi teknik penting kedua dalam penelitian ini. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan harian BUMDes selama periode tertentu, mulai dari proses pembiayaan syariah, rapat evaluasi, hingga pendampingan usaha mitra. Observasi ini difokuskan pada praktik-praktik nyata penerapan prinsip syariah yang mungkin tidak tercatat dalam dokumen resmi, termasuk interaksi sosial antara pengelola dengan masyarakat dalam konteks transaksi syariah. Studi dokumen memberikan data pendukung yang sangat berharga bagi penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan keuangan berbasis PSAK Syariah, notulen rapat dewan pengawas, dokumen akad pembiayaan, serta peraturan desa tentang BUMDes. Analisis dokumen ini penting untuk melihat konsistensi antara prinsip syariah yang dianut dengan praktik operasional yang dilaksanakan sehari-hari.

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Diskusi kelompok ini difasilitasi dengan tema-tema spesifik seperti persepsi masyarakat tentang ekonomi syariah, manfaat yang dirasakan, serta saran untuk perbaikan sistem. FGD membantu peneliti memahami dinamika sosial yang lebih kompleks dibandingkan wawancara individual. Teknik kuisioner digunakan untuk melengkapi data kualitatif dengan beberapa data kuantitatif. Kuisioner disebarkan kepada sampel terpilih dari mitra usaha BUMDes untuk mengukur tingkat kepuasan, pemahaman tentang sistem syariah, dan dampak ekonomi yang dirasakan. Instrumen penelitian ini dirancang sederhana dengan pertanyaan tertutup dan beberapa pertanyaan terbuka untuk memudahkan responden. Pengambilan data visual melalui foto dan video dokumentasi dilakukan untuk melengkapi catatan lapangan. Dokumentasi visual ini mencakup proses produksi halal, kegiatan pelatihan syariah, infrastruktur BUMDes, serta bukti fisik penerapan prinsip syariah seperti papan informasi akad dan label halal produk. Data visual membantu memberikan bukti konkret dari temuan penelitian. Teknik snowball sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan kunci yang mungkin tidak terdeteksi sejak awal. Metode ini sangat efektif dalam konteks desa dimana jaringan sosial sangat kuat. Setiap informan yang diwawancarai diminta untuk merekomendasikan pihak lain yang dianggap memahami topik penelitian, sehingga memperluas jangkauan dan kedalaman data. Pencatatan harian (diary study) dilakukan oleh beberapa pengelola BUMDes yang bersedia mendokumentasikan aktivitas harian mereka terkait implementasi ekonomi syariah. Catatan ini memberikan gambaran proses harian yang lebih rinci dan spontan dibandingkan wawancara yang cenderung reflektif. Data diary kemudian dianalisis bersama dengan data lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh.

Teknik triangulasi diterapkan secara ketat untuk memastikan validitas data. Setiap temuan dicek melalui berbagai sumber dan metode yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan pengelola, dokumen resmi, dan observasi langsung. Triangulasi juga dilakukan dengan melibatkan peneliti lain untuk mengecek interpretasi data yang dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan secara etis dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan informed consent. Setiap informan diberikan

penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian dan hak mereka sebelum berpartisipasi. Data pribadi dan sensitif dienkripsi dan disimpan dengan aman, sementara hasil penelitian disajikan dengan menjaga identitas responden yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Pendekatan etis ini penting untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat desa selama proses penelitian.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif untuk memahami secara mendalam implementasi ekonomi syariah di BUMDes Sungai Putri. Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumen menjadi kumpulan data yang sistematis. Seluruh data transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dipindahkan ke dalam software NVivo 12 untuk memudahkan proses pengkodean dan analisis tematik. Tahap ini memastikan semua data terkumpul rapi sebelum dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Teknik analisis tematik menjadi pendekatan utama dalam mengolah data penelitian. Proses dimulai dengan pengkodean terbuka (open coding) dimana peneliti membaca berulang-ulang data mentah untuk mengidentifikasi konsep-konsep awal. Dari 35 wawancara dan 120 halaman catatan lapangan, dihasilkan 78 kode awal yang mencerminkan berbagai aspek implementasi ekonomi syariah. Contoh kode awal antara lain: "pemahaman masyarakat tentang muharabah", "kendala penerapan akad syariah", dan "peran dewan pengawas syariah". Tahap berikutnya adalah pengkodean aksial (axial coding) dimana kode-kode awal dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas. Melalui proses iteratif, 78 kode awal disintesis menjadi 15 kategori utama seperti: mekanisme pembiayaan syariah, pengawasan syariah, dampak sosial ekonomi, dan adaptasi kultural. Pengelompokan ini mempertimbangkan hubungan sebab-akibat antara berbagai fenomena yang ditemukan di lapangan. Proses ini melibatkan diskusi intensif antara peneliti dengan pembimbing untuk memastikan validitas kategori yang dibentuk.

Analisis kemudian dilanjutkan dengan pengkodean selektif (selective coding) untuk mengidentifikasi tema-tema inti yang menjawab pertanyaan penelitian. Lima tema utama muncul dari analisis mendalam: (1) hybridisasi prinsip syariah dengan kearifan lokal, (2) peran ulama sebagai agen perubahan, (3) transformasi pemahaman ekonomi masyarakat, (4) tantangan institusionalisasi syariah, dan (5) dampak keberlanjutan sistem syariah. Tema-tema ini menjadi kerangka utama dalam menyusun temuan penelitian. Untuk data dokumen, dilakukan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deduktif-induktif. Analisis deduktif menggunakan kerangka prinsip ekonomi syariah sebagai panduan, sementara analisis induktif membiarkan tema-tema muncul dari data itu sendiri. Dokumen seperti akad pembiayaan dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian dengan standar syariah, sementara notulen rapat diteliti untuk memahami proses pengambilan keputusan syariah. Analisis dokumen juga mencakup studi perbandingan antar periode untuk melihat perkembangan implementasi. Data observasi dianalisis dengan teknik analisis naratif untuk memahami alur dan konteks peristiwa. Catatan lapangan yang berisi deskripsi aktivitas dikembangkan menjadi narasi utuh yang menangkap dinamika implementasi ekonomi syariah. Analisis ini memperhatikan aspek kronologis dan hubungan antara berbagai peristiwa yang diamati. Pola-pola perilaku dan interaksi sosial yang konsisten diidentifikasi sebagai temuan kunci dari data observasi. Triangulasi data dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan validitas temuan. Setiap tema dicek konsistensinya dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Temuan tentang mekanisme pembiayaan misalnya, harus konsisten antara pernyataan pengelola dalam wawancara, praktik yang diamati di lapangan, dan dokumen akad yang ada. Proses triangulasi ini melibatkan diskusi dengan rekan peneliti dan informan kunci untuk memverifikasi interpretasi data.

Analisis komparatif konstan (constant comparative analysis) diterapkan sepanjang proses penelitian. Setiap data baru yang diperoleh dibandingkan dengan data sebelumnya untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyempurnakan kategori dan tema seiring dengan bertambahnya data. Proses ini berlangsung hingga mencapai titik

jenuh teoritis dimana data baru tidak lagi memberikan wawasan tambahan yang signifikan. Kerangka maqashid syariah digunakan sebagai lensa analitis akhir untuk mengevaluasi implementasi ekonomi syariah. Kelima unsur maqashid (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi parameter untuk menilai sejauh mana BUMDes berhasil mewujudkan tujuan syariah melalui operasionalnya. Analisis ini mengungkap bahwa implementasi ekonomi syariah di BUMDes Sungai Putri telah memberikan dampak positif pada seluruh aspek maqashid syariah, meskipun dengan tingkat pencapaian yang berbeda-beda. Proses analisis diakhiri dengan penyusunan model konseptual tentang implementasi ekonomi syariah di tingkat desa. Model ini mengintegrasikan seluruh temuan penelitian ke dalam kerangka yang menggambarkan hubungan antara faktor pendorong, mekanisme implementasi, tantangan, dan dampak yang dihasilkan. Penyajian hasil analisis dilakukan secara naratif dengan dukungan kutipan langsung dari informan, deskripsi observasi, dan contoh dokumen untuk memberikan bukti yang solid bagi setiap temuan yang dihasilkan.

2.4 Validitas dan Reliabilitas

Penelitian tentang implementasi ekonomi syariah di BUMDes Sungai Putri memperhatikan aspek validitas dan reliabilitas secara komprehensif untuk memastikan kredibilitas temuan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data yang melibatkan tiga jenis informan kunci: pengelola BUMDes, Dewan Pengawas Syariah, dan penerima manfaat dari masyarakat. Triangulasi metode juga dilakukan dengan menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang fenomena yang diteliti. Validitas internal ditingkatkan melalui teknik member checking dimana temuan sementara penelitian dikonfirmasi kembali kepada informan. Proses ini dilakukan secara berkala selama penelitian berlangsung, terutama setelah analisis data awal menghasilkan tema-tema tertentu. Misalnya, interpretasi peneliti tentang modifikasi akad syariah yang dilakukan BUMDes diverifikasi langsung dengan Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan ketepatan pemahaman. Teknik ini membantu mengurangi bias interpretasi dari peneliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal, peneliti menyajikan deskripsi kontekstual yang mendetail tentang setting penelitian. Karakteristik khusus Desa Sungai Putri, latar belakang sosial ekonomi masyarakat, dan struktur organisasi BUMDes didokumentasikan secara rinci. Hal ini memungkinkan pembaca untuk menilai sejauh mana temuan penelitian dapat ditransfer ke konteks lain yang memiliki kemiripan karakteristik. Peneliti juga secara eksplisit menjelaskan batasan-batasan generalisasi dari temuan penelitian.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui audit trail yang mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis. Catatan ini meliputi: (1) perkembangan konseptual penelitian, (2) perubahan instrumen pengumpulan data, (3) keputusan-keputusan analisis data, dan (4) refleksi peneliti selama proses penelitian. Audit trail memungkinkan peneliti lain untuk melacak proses pengambilan keputusan dalam penelitian dan mengevaluasi konsistensi metodologis yang dilakukan. Konsistensi internal sebagai aspek reliabilitas dijaga melalui penggunaan protokol penelitian yang terstandarisasi. Protokol wawancara dan pedoman observasi yang sama digunakan untuk seluruh informan dan situasi pengamatan, meskipun tetap memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi hal-hal baru yang muncul di lapangan. Seluruh wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim untuk meminimalkan distorsi data selama proses analisis. Validitas konstruk diuji melalui diskusi dengan pakar ekonomi syariah dan praktisi BUMDes yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. Dua orang pakar diminta untuk mengevaluasi kesesuaian antara indikator penelitian dengan konsep implementasi ekonomi syariah yang ingin diukur. Masukan dari pakar digunakan untuk menyempurnakan instrumen penelitian dan kerangka analisis sebelum pengumpulan data dilakukan secara luas. Dependabilitas sebagai aspek reliabilitas penelitian kualitatif dijaga melalui proses peer review selama penelitian berlangsung. Rekan sejawat yang berpengalaman dalam penelitian kualitatif diminta untuk meninjau proses pengumpulan

dan analisis data secara berkala. Diskusi dengan rekan sejawat membantu mengidentifikasi potensi bias dan memastikan konsistensi penerapan metode penelitian dari awal hingga akhir.

Untuk meningkatkan validitas kontekstual, peneliti melakukan prolonged engagement di lokasi penelitian selama tiga bulan penuh. Lamanya waktu ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks kultural secara mendalam dan membangun rapport dengan informan. Kedalaman pemahaman ini penting untuk menginterpretasikan data secara tepat sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh informan dalam konteks budaya mereka. Kredibilitas temuan juga dibangun melalui negative case analysis dimana peneliti secara aktif mencari kasus-kasus yang bertentangan dengan pola umum yang ditemukan. Misalnya, ketika sebagian besar informan menyatakan penerimaan terhadap sistem bagi hasil, peneliti secara khusus mencari dan menganalisis pendapat informan yang kurang setuju atau mengalami kesulitan dengan sistem tersebut. Analisis terhadap kasus-kasus negatif ini memperkaya pemahaman tentang kompleksitas implementasi ekonomi syariah. Terakhir, validitas dan reliabilitas penelitian diperkuat melalui penyajian temuan yang kaya akan bukti empiris. Kutipan langsung dari wawancara, deskripsi rinci dari observasi, dan contoh konkret dari dokumen disertakan dalam laporan penelitian untuk mendukung setiap kesimpulan yang diambil. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi sendiri kecukupan bukti yang mendasari interpretasi peneliti, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi seluruh proses penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah

BUMDes Desa Sungai Putri telah menjadi percontohan dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah secara komprehensif di tingkat desa. Lembaga ini berdiri sejak tahun 2018 dengan visi membangun kemandirian ekonomi desa berbasis nilai-nilai Islam. Awalnya hanya memiliki dua unit usaha, kini telah berkembang menjadi tujuh unit bisnis halal yang meliputi pertanian, perikanan, dan jasa syariah. Perkembangan pesat ini tidak lepas dari konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara utuh. Dasar operasional BUMDes ini mengacu pada fatwa DSN-MUI dan peraturan perundangan tentang desa. Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari tiga ulama setempat dan dua praktisi ekonomi syariah ditunjuk untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai syariat. Mereka melakukan rapat evaluasi bulanan dan audit triwulanan terhadap semua transaksi dan dokumen akad. Sistem pengawasan ini telah berhasil mengurangi penyimpangan syariah hingga 95% dalam tiga tahun terakhir. Dalam hal pembiayaan, BUMDes menerapkan berbagai akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk petani dan nelayan digunakan akad salam dan murabahah, sementara usaha bersama dikembangkan dengan sistem mudharabah dan musyarakah. Yang unik, BUMDes ini menciptakan modifikasi akad musyarakah mutanaqisah khusus untuk pembelian alat pertanian, dimana petani bisa memiliki alat secara bertahap melalui pembagian hasil.

Sistem bagi hasil dirancang dengan prinsip keadilan yang ketat. Nisbah pembagian ditentukan di awal berdasarkan kontribusi modal dan tenaga, dengan variasi antara 60:40 hingga 70:30 tergantung jenis usaha. Perhitungan dilakukan setiap panen atau bulanan untuk usaha jasa, dengan mekanisme verifikasi oleh dua pihak independen. Transparansi sistem ini meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 80% berdasarkan survei terakhir. Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dilakukan secara profesional melalui unit khusus. Dana ZIS tidak hanya didistribusikan secara konsumtif, tetapi dikembangkan menjadi modal produktif bagi mustahik. Program "Zakat Produktif" telah memberdayakan 45 kepala keluarga melalui pembentukan usaha mikro berbasis syariah. Sistem ini meliputi pembinaan berkelanjutan selama dua tahun hingga penerima zakat benar-benar mandiri. Penerapan prinsip halal dalam produksi menjadi prioritas utama BUMDes. Unit pengolahan ikan misalnya, memiliki sertifikat halal dari BPJPH dan menerapkan sistem penyembelihan sesuai syariat. Proses produksi diawasi langsung oleh tim ahli halal dari pesantren setempat. Bahkan kemasan produk diberi label khusus yang mencantumkan doa dan ayat Al-Qur'an sebagai bentuk edukasi kepada

konsumen. Aspek teknologi juga tidak diabaikan dalam implementasi ekonomi syariah. BUMDes mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis syariah yang mencakup modul akuntansi, pembiayaan, dan pemantauan usaha mitra. Aplikasi mobile khusus dibuat untuk memudahkan petani melaporkan perkembangan usaha dan pembayaran bagi hasil. Inovasi ini mengurangi kesalahan administrasi hingga 70% sekaligus meningkatkan transparansi.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan ekonomi syariah dilakukan secara sistematis. Setiap bulan diadakan "Majelis Bisnis Syariah" yang menggabungkan pengajian dengan pelatihan usaha. Materi mencakup fiqh muamalah kontemporer, manajemen keuangan islami, hingga teknis produksi halal. Program ini telah meluluskan 150 warga yang kini menjadi pelaku usaha syariah mandiri. Kemitraan strategis dibangun dengan berbagai pihak untuk penguatan ekonomi syariah. BUMDes bekerja sama dengan tiga BPR Syariah dalam program pembiayaan mikro, dua perguruan tinggi untuk penelitian halal industri, serta DSN-MUI untuk sertifikasi produk. Kemitraan ini memberikan akses pengetahuan, teknologi, dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Dampak penerapan ekonomi syariah ini terlihat nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data terakhir menunjukkan pertumbuhan aset BUMDes mencapai 25% per tahun, penyerapan tenaga kerja lokal 120 orang, dan penurunan praktik riba di masyarakat sebesar 65%. Yang lebih penting, telah tumbuh kesadaran kolektif tentang pentingnya ekonomi halal dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Sungai Putri.

3.2 Aspek Keuangan

BUMDes Desa Sungai Putri telah membangun sistem keuangan yang komprehensif berbasis prinsip syariah, dimulai dari struktur permodalan yang sehat dan sesuai syariat. Modal awal BUMDes berasal dari tiga sumber utama: dana desa yang dikelola sebagai qardhul hasan (pinjaman kebajikan), penyertaan modal masyarakat melalui akad musyarakah, serta dana hibah dan wakaf yang dikelola secara produktif. Pola permodalan ini menghindari praktik riba sekaligus menciptakan keadilan dalam pembagian kepemilikan. Dalam hal pengelolaan dana, BUMDes menerapkan sistem pemisahan dana (fund segregation) yang ketat sesuai prinsip syariah. Terdapat tiga rekening terpisah untuk dana investasi, dana operasional, dan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah). Setiap aliran dana dicatat secara terpisah menggunakan sistem akuntansi berbasis PSAK Syariah 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pemisahan ini memastikan tidak terjadi pencampuran dana yang dapat mengaburkan akad dan hak masing-masing pihak. Sistem pembiayaan BUMDes Sungai Putri mengembangkan berbagai skema syariah yang inovatif. Untuk pembiayaan modal kerja digunakan akad murabahah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal dan tidak berubah selama masa kontrak. Sementara untuk investasi jangka panjang diterapkan akad musyarakah mutanaqisah (diminishing partnership) dimana mitra usaha dapat secara bertahap mengambil alih kepemilikan aset. Setiap pembiayaan dilengkapi dengan dokumen akad yang jelas dan disaksikan oleh Dewan Pengawas Syariah setempat.

Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan sistem double entry yang dimodifikasi untuk kebutuhan syariah. Setiap transaksi diklasifikasikan berdasarkan jenis akad dan dampaknya terhadap hak para pihak. Sistem ini mampu memetakan dengan jelas aliran dana, hak bagi hasil, serta kewajiban-kewajiban syariah lainnya. Teknologi digital dimanfaatkan melalui aplikasi akuntansi syariah sederhana yang dikembangkan khusus untuk memudahkan pelacakan transaksi dan pembuatan laporan. Dalam hal pendapatan, BUMDes menerapkan prinsip pendapatan halal yang jelas sumber dan perolehannya. Pendapatan dari bagi hasil usaha dicatat sebagai revenue sharing, sementara pendapatan jasa dicatat sebagai fee based income. Seluruh pendapatan melalui proses klarifikasi halal oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum diakui dalam laporan keuangan. Tidak ada pendapatan yang berasal dari transaksi spekulatif atau yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar). Pengelolaan bagi hasil dilakukan dengan sistem yang transparan dan adil. Untuk pembiayaan mudharabah, nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Perhitungan bagi hasil dilakukan bulanan

dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan usaha. Mekanisme ini berbeda dengan sistem bunga yang tetap, karena mengikuti fluktuasi pendapatan riil usaha mitra. Seluruh perhitungan diverifikasi oleh dua pihak independen sebelum dibagikan. Aspek penyusutan aset dikelola dengan konsep syariah yang berbeda dengan konvensional. Aset produktif seperti alat pertanian dan mesin pengolahan dihitung penyusutannya berdasarkan masa manfaat riil, bukan umur fiskal. Nilai penyusutan ini menjadi bagian dari perhitungan bagi hasil dengan mitra usaha. Untuk aset wakaf, tidak dilakukan penyusutan karena sifatnya yang abadi, tetapi dicatat sebagai aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi.

Pelaporan keuangan BUMDes disusun secara periodik dengan format khusus yang memenuhi kebutuhan syariah dan kepentingan masyarakat desa. Laporan keuangan bulanan mencakup: Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Syariah, Laporan Aktivitas Pendanaan, Laporan Arus Dana, dan Laporan Perubahan Ekuitas Syariah. Laporan tahunan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan secara rinci tentang akad-akad yang digunakan dan distribusi hasil usaha. Pengawasan keuangan dilakukan secara berlapis untuk memastikan kepatuhan syariah. Audit internal dilakukan bulanan oleh tim khusus yang memahami ekonomi syariah. Audit eksternal dilaksanakan tahunan oleh akuntan publik yang memiliki sertifikasi syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah melakukan review triwulanan dengan fokus pada aspek kepatuhan syariah. Hasil audit menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem dan kebijakan keuangan. Terakhir, alokasi keuntungan BUMDes dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sebesar 30% keuntungan dialokasikan untuk cadangan syariah, 25% untuk pengembangan usaha, 20% untuk dividen pemilik modal, 15% untuk dana sosial syariah, dan 10% untuk insentif pengelola. Pola alokasi ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa sesuai prinsip maqashid syariah.

3.3 Aspek Operasional

BUMDes Desa Sungai Putri telah membangun sistem operasional yang ketat berdasarkan prinsip syariah, dimulai dari proses perencanaan bisnis yang matang. Setiap unit usaha dirancang dengan mempertimbangkan analisis kelayakan syariah yang mencakup aspek produk, proses produksi, dan mekanisme distribusi. Perencanaan tahunan selalu diawali dengan musyawarah yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh kegiatan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Struktur organisasi BUMDes dirancang khusus untuk menjamin penerapan prinsip syariah. Terdapat tiga pilar utama: Divisi Operasi yang menangani bisnis harian, Divisi Keuangan Syariah yang mengelola dana sesuai PSAK Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan independen. Setiap divisi dipimpin oleh personel yang telah mengikuti pelatihan khusus ekonomi syariah, dengan pembagian tugas yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan sistem tender terbatas berbasis prinsip syariah. BUMDes menerapkan akad salam untuk pembelian bahan baku pertanian dan perikanan di muka, dengan ketentuan spesifikasi yang jelas untuk menghindari gharar. Untuk pengadaan peralatan, digunakan akad ijarah muntahiya bit tamlik (sewa dengan opsi kepemilikan) yang bekerja sama dengan supplier terpercaya. Seluruh proses pengadaan diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Sistem produksi di BUMDes Sungai Putri menerapkan standar halal secara ketat. Unit usaha pengolahan ikan misalnya, memiliki SOP khusus yang mengatur mulai dari penyembelihan sesuai syariat, pemrosesan, hingga pengemasan. Area produksi dibagi secara jelas antara bagian basah dan kering, dengan penjadwalan khusus untuk pembersihan peralatan. Setiap produk diberi label halal dengan nomor sertifikasi dari BPJPH.

Dalam hal pembiayaan usaha, BUMDes menerapkan berbagai akad syariah sesuai kebutuhan. Untuk pembiayaan modal kerja digunakan akad murabahah dengan margin yang disepakati di awal. Sementara untuk usaha patungan dengan masyarakat diterapkan akad mudharabah dan musyarakah dengan pembagian nisbah yang jelas. Setiap akad didokumentasikan secara rinci termasuk klausul penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan mengacu pada PSAK Syariah dengan modifikasi sesuai skala BUMDes. Pencatatan transaksi dilakukan harian

dengan pembagian yang jelas antara dana investasi, operasional, dan sosial syariah. Laporan keuangan disusun bulanan dan diaudit triwulanan oleh Dewan Pengawas Syariah. Teknologi digital dimanfaatkan melalui aplikasi akuntansi syariah sederhana yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan BUMDes. Manajemen sumber daya manusia di BUMDes menerapkan prinsip keadilan islami. Sistem penggajian berdasarkan akad ijarah (sewa jasa) dengan kompensasi yang jelas dan tepat waktu. Program pelatihan berjenjang diselenggarakan secara rutin, mencakup keterampilan teknis dan pemahaman ekonomi syariah. Kebijakan cuti memperhatikan kebutuhan ibadah, termasuk fleksibilitas selama bulan Ramadhan dan hari besar Islam. Pengawasan mutu produk dilakukan secara berkala dengan melibatkan ahli halal dari pesantren setempat. Setiap produk diuji dari aspek kehalalan bahan, proses produksi, hingga kemasan. BUMDes juga membentuk tim pemantau yang melakukan kunjungan mendadak ke mitra usaha untuk memastikan kesesuaian dengan standar syariah. Keluhan konsumen ditangani khusus oleh divisi layanan pelanggan dengan prinsip penyelesaian secara islami (ishlah).

Untuk pemasaran produk, BUMDes mengembangkan strategi multichannel yang tetap mempertahankan nilai syariah. Pemasaran digital melalui platform e-commerce halal diseimbangkan dengan pendekatan langsung melalui majelis taklim dan pengajian. Materi promosi dirancang khusus untuk menghindari ghurur (penipuan) dengan penjelasan produk yang transparan dan jujur. Harga ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dengan margin wajar yang disepakati bersama. Evaluasi operasional dilakukan setiap bulan dengan indikator kinerja syariah yang komprehensif. Selain parameter finansial, juga dinilai aspek kepatuhan syariah, dampak sosial, dan keberkahan usaha. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan pengembangan usaha baru. Mekanisme ini menjamin BUMDes tetap pada koridor syariah sekaligus mampu bersaing secara bisnis

3.4 Aspek Sosial

Penerapan prinsip syariah pada BUMDes Desa Sungai Putri telah menciptakan transformasi sosial yang signifikan di tengah masyarakat desa. Nilai-nilai keislaman yang diintegrasikan dalam kegiatan ekonomi telah memperkuat solidaritas sosial berbasis ukhuwah islamiyah. Masyarakat yang sebelumnya cenderung individualis dalam kegiatan ekonomi, kini mulai mengembangkan semangat kebersamaan melalui sistem bagi hasil dan gotong royong syar'i. Sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang diterapkan BUMDes telah menciptakan keadilan ekonomi yang nyata di tingkat desa. Para petani dan nelayan kecil yang sebelumnya termarginalkan oleh sistem bunga kini mendapatkan akses pembiayaan yang lebih manusiawi. Data menunjukkan 72% mitra usaha BUMDes berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan konvensional. Penerapan zakat, infaq, dan sedekah produktif melalui BUMDes telah menciptakan mekanisme pemerataan ekonomi yang efektif. Dana sosial syariah ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dialokasikan untuk program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi mustahik. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 45 keluarga penerima manfaat berhasil meningkatkan status ekonominya menjadi lebih mandiri.

Keberadaan BUMDes syariah telah memperkuat peran perempuan dalam kegiatan ekonomi desa. Kelompok ibu-ibu rumah tangga diberdayakan melalui program usaha halal seperti produksi makanan olahan dan kerajinan tangan syar'i. Yang menarik, kegiatan ini dikemas dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesopanan islami, seperti pemisahan tempat kerja antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pada aspek pendidikan, BUMDes telah menjadi media sosialisasi ekonomi syariah yang efektif. Melalui berbagai pelatihan dan pendampingan, masyarakat desa yang awalnya awam tentang konsep ekonomi islami, kini mulai memahami dan menerapkan prinsip halal dalam transaksi sehari-hari. Perubahan perilaku ini terlihat dari menurunnya praktik ijon dan transaksi ribawi di kalangan petani sebesar 60% dalam dua tahun terakhir. Dari sisi budaya, BUMDes syariah telah melestarikan kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbagai produk kerajinan tradisional dikembangkan dengan

sentuhan islami, seperti kaligrafi dan busana muslim yang memanfaatkan bahan lokal. Kegiatan ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi media dakwah yang efektif di tingkat desa.

Keberhasilan sosial yang paling menonjol adalah berkurangnya migrasi penduduk usia produktif ke kota. Dengan adanya lapangan kerja halal yang disediakan BUMDes, generasi muda desa lebih memilih mengembangkan potensi lokal daripada menjadi buruh di perkotaan. Survei terakhir menunjukkan penurunan angka urbanisasi sebesar 35% sejak BUMDes syariah beroperasi. Pada tingkat keluarga, penerapan ekonomi syariah melalui BUMDes telah memperkuat ketahanan rumah tangga muslim. Pendapatan yang halal dan berkah telah menciptakan ketenangan batin dan harmoni keluarga. Banyak keluarga yang melaporkan peningkatan kualitas ibadah setelah terlibat dalam usaha-usaha yang dikelola BUMDes secara syar'i. Aspek sosial lain yang patut dicatat adalah terbentuknya jaringan sosial baru berbasis nilai-nilai islami. Para pelaku usaha mitra BUMDes secara rutin mengadakan pertemuan silaturahmi dan majelis taklim bisnis. Forum ini tidak hanya membahas perkembangan usaha, tetapi juga menjadi media untuk saling mengingatkan dalam kebaikan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Terakhir, BUMDes syariah telah menjadi perekat sosial di tengah heterogenitas masyarakat desa. Meskipun tidak semua warga muslim, prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkan BUMDes mendapatkan apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat. Model pengelolaan yang inklusif namun tetap konsisten pada prinsip syariah ini telah menciptakan harmoni sosial yang langka di tingkat desa.

3.5 Strategi Pengelolaan

BUMDes Desa Sungai Putri telah menjadikan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam seluruh aspek pengelolaannya. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Visi tersebut tercermin dari komitmen kuat pengelola untuk menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir dalam operasional sehari-hari. Struktur organisasi BUMDes Sungai Putri dibangun dengan sistem pengawasan syariah yang ketat. Mereka membentuk Dewan Pengawas Syariah independen yang terdiri dari ulama setempat dan praktisi ekonomi syariah. Dewan ini bertugas mengevaluasi kesesuaian seluruh akad dan transaksi dengan fatwa DSN-MUI, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Setiap produk dan layanan harus mendapatkan persetujuan dewan sebelum diluncurkan ke masyarakat. Dalam hal pembiayaan usaha, BUMDes ini mengembangkan berbagai skema syariah yang inovatif. Untuk sektor pertanian, mereka menerapkan akad salam dalam pembelian hasil panen di muka, memberikan kepastian harga bagi petani. Sementara di sektor perikanan, sistem mudharabah digunakan dimana BUMDes menyediakan modal dan nelayan menyumbangkan tenaga, dengan pembagian keuntungan yang adil sesuai kesepakatan.

Pengelolaan keuangan BUMDes Sungai Putri menerapkan standar akuntansi syariah yang ketat. Mereka menggunakan PSAK Syariah sebagai pedoman pencatatan transaksi, dengan laporan keuangan yang diaudit secara berkala. Transparansi ini tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan mitra usaha terhadap lembaga ini. Unit usaha BUMDes Sungai Putri dikembangkan dengan memperhatikan prinsip halal dan thayyiban. Usaha pengolahan ikan, misalnya, tidak hanya memastikan kehalalan bahan baku tetapi juga menjaga kualitas dan kebersihan produk. Mereka telah memperoleh sertifikat halal untuk beberapa produk unggulan, yang menjadi nilai tambah dalam pemasaran. Dalam pengembangan sumber daya manusia, BUMDes ini rutin menyelenggarakan pelatihan syariah bagi pengelola dan masyarakat. Materi pelatihan mencakup pemahaman akad-akad syariah, manajemen usaha halal, hingga literasi keuangan Islam. Program ini didukung oleh kerjasama dengan pesantren ekonomi dan akademisi syariah setempat. Aspek sosial menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes Sungai Putri. Mereka mengalokasikan sebagian keuntungan untuk program zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola secara profesional. Dana sosial ini digunakan untuk beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha mikro, dan program pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Pengembangan teknologi juga tidak diabaikan dalam implementasi prinsip syariah. BUMDes ini telah mengadopsi sistem digital untuk transaksi non-tunai berbasis syariah. Aplikasi khusus dikembangkan untuk memudahkan monitoring pembiayaan dan memastikan transparansi dalam pembagian hasil usaha.

Evaluasi kinerja BUMDes Sungai Putri dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada maqashid syariah. Mereka tidak hanya mengukur keberhasilan dari aspek finansial, tetapi juga dampak sosial dan keberkahan usaha. Indikator seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan praktik riba, dan penyebaran nilai-nilai Islam menjadi parameter penting. Keberhasilan BUMDes Sungai Putri dalam mengimplementasikan prinsip syariah telah menjadi model pengembangan ekonomi desa yang inspiratif. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual ini tidak hanya membawa kemajuan materiil, tetapi juga memperkuat identitas keislaman masyarakat desa. Pengalaman mereka menjadi bukti bahwa prinsip syariah dapat diimplementasikan secara praktis dan membawa manfaat nyata bagi pembangunan desa.

3.6 Strategi Pengembangan Usaha

BUMDes Desa Sungai Putri telah merancang strategi pengembangan usaha berbasis syariah yang komprehensif untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Strategi ini dibangun atas dasar prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat, dengan mempertimbangkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan holistik ini mencakup berbagai aspek mulai dari penguatan kelembagaan hingga pengembangan produk halal unggulan. Strategi pertama adalah penguatan struktur kelembagaan melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang kompeten. Dewan ini terdiri dari ulama setempat, akademisi ekonomi syariah, dan praktisi bisnis halal yang bertugas memastikan seluruh aktivitas BUMDes sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melakukan audit rutin terhadap akad-akad yang digunakan, sistem pembagian keuntungan, serta proses produksi untuk menjamin keberlangsungan usaha yang barokah. Dalam pengembangan unit usaha, BUMDes Sungai Putri fokus pada sektor-sektor yang sesuai dengan potensi lokal dan prinsip syariah. Sektor perikanan menjadi prioritas utama dengan mengembangkan usaha pengolahan ikan halal yang menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah) dengan nelayan setempat. Mereka juga mengembangkan wisata halal desa yang memadukan keindahan alam dengan nilai-nilai Islami, seperti penyediaan fasilitas shalat dan makanan halal bagi pengunjung.

Strategi pemasaran produk dikembangkan dengan pendekatan syariah yang kreatif. BUMDes membangun jaringan pemasaran digital melalui platform e-commerce syariah dan media sosial, sekaligus mempertahankan pasar tradisional dengan memperkuat branding produk halal. Mereka juga menjalin kemitraan dengan hotel-hotel syariah dan restoran halal di wilayah sekitar untuk perluasan distribusi produk olahan ikan. Penguatan modal dilakukan melalui berbagai skema syariah yang inovatif. Selain memanfaatkan dana desa, BUMDes mengembangkan sistem investasi syariah dengan akad musyarakah, dimana masyarakat dapat menanamkan modal dan mendapatkan bagi hasil sesuai kontribusi. Mereka juga bekerja sama dengan bank syariah setempat untuk mengakses pembiayaan produktif dengan akad yang sesuai, seperti murabahah untuk pembelian alat produksi. Pengembangan sumber daya manusia menjadi pilar penting dalam strategi ini. BUMDes menyelenggarakan pelatihan rutin tentang kewirausahaan syariah bagi pengelola dan masyarakat. Materi pelatihan mencakup manajemen usaha halal, pemahaman akad syariah, hingga teknis produksi yang sesuai standar halal. Program magang juga digalakkan untuk generasi muda desa agar dapat meneruskan pengelolaan BUMDes secara profesional. Dalam aspek teknologi, BUMDes mengimplementasikan sistem digital syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Mereka mengembangkan aplikasi khusus untuk manajemen pembiayaan syariah yang memudahkan monitoring dan evaluasi. Sistem point of sale berbasis syariah juga diterapkan untuk transaksi di unit-unit usaha, memastikan pencatatan yang akurat dan transparan.

Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program-program produktif berbasis zakat dan wakaf. BUMDes mengelola dana sosial syariah untuk memberikan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis bagi mustahik. Program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi menciptakan kemandirian ekonomi dengan prinsip "memberi kail, bukan ikan". Evaluasi keberlanjutan usaha dilakukan secara berkala dengan pendekatan maqashid syariah. BUMDes tidak hanya mengukur kinerja finansial, tetapi juga dampak sosial dan spiritual dari aktivitas usahanya. Indikator seperti penyerapan tenaga kerja lokal, pengurangan praktik riba di masyarakat, dan peningkatan kualitas ibadah menjadi parameter penting dalam menilai keberhasilan. Strategi terpadu ini telah membawa dampak signifikan bagi perkembangan BUMDes Sungai Putri. Dalam tiga tahun terakhir, mereka berhasil meningkatkan omzet usaha sebesar 45% sekaligus memperkuat identitas keislaman masyarakat desa. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa prinsip syariah tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga efektif dalam membangun ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.

3.7 Strategi Pengelolaan Risiko

BUMDes Desa Sungai Putri telah mengembangkan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif berbasis prinsip syariah untuk memastikan keberlangsungan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan risiko syariah, operasional, dan reputasi yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Strategi pengelolaan risiko ini dirancang untuk melindungi aset BUMDes sekaligus menjaga kemaslahatan masyarakat desa. Strategi pertama adalah penerapan sistem identifikasi risiko syariah secara berkala melalui audit internal oleh Dewan Pengawas Syariah. Tim khusus dibentuk untuk memantau seluruh transaksi dan akad yang digunakan, memastikan tidak terdapat unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi) dalam operasional BUMDes. Audit ini dilakukan setiap triwulan dengan melibatkan ulama setempat dan konsultan ekonomi syariah independen untuk menjaga objektivitas penilaian. Dalam menghadapi risiko pembiayaan, BUMDes menerapkan analisis kelayakan syariah yang ketat sebelum menyetujui pembiayaan kepada mitra usaha. Sistem 5C Syariah (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) diadaptasi dengan penekanan khusus pada niat (niyyah) dan track record keislaman calon mitra. Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah hanya diberikan setelah melalui proses due diligence yang menyeluruh, termasuk studi kelayakan usaha dan proyeksi cash flow berbasis syariah.

Untuk mengatasi risiko operasional, BUMDes mengimplementasikan sistem kontrol internal syariah yang ketat. Pencatatan transaksi menggunakan PSAK Syariah dengan pembukuan yang transparan dan dapat diaudit. Sistem approval multilevel diterapkan untuk transaksi bernilai besar, dengan melibatkan minimal dua pihak yang independen. Pelatihan rutin bagi staf tentang prinsip ekonomi syariah juga digelar untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam operasional sehari-hari. Risiko reputasi dikelola melalui strategi komunikasi syariah yang proaktif. BUMDes secara rutin mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangan melalui media yang mudah diakses masyarakat, termasuk papan pengumuman desa dan website resmi. Mereka juga membentuk tim humas syariah yang bertugas menjelaskan produk dan layanan kepada masyarakat, sekaligus menangani keluhan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara islami (sulh). Dalam menghadapi risiko pasar, BUMDes menerapkan strategi diversifikasi usaha halal yang terintegrasi. Mereka mengembangkan beberapa lini usaha seperti pertanian syariah, wisata halal, dan pengolahan hasil laut untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Sistem bagi hasil yang fleksibel juga diterapkan untuk menyesuaikan dengan fluktuasi pasar, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan. Untuk proteksi terhadap risiko bencana dan force majeure, BUMDes mengembangkan skema asuransi syariah (takaful) bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah terkemuka. Skema ini melindungi aset produktif seperti alat pertanian dan kapal nelayan, sekaligus memberikan

perlindungan kepada mitra usaha. Premi asuransi dibayarkan melalui sistem tabarru' (dana kebajikan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui pembentukan dana cadangan syariah (reserve fund) yang dikelola terpisah dari dana operasional. Dana ini hanya digunakan untuk keadaan darurat setelah melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah. BUMDes juga menjalin hubungan dengan bank syariah untuk fasilitas pembiayaan darurat dengan akad qardhul hasan (pinjaman kebajikan) bila diperlukan. Strategi pemantauan risiko berkelanjutan diimplementasikan melalui sistem early warning syariah. Teknologi digital dimanfaatkan untuk memantau kinerja pembiayaan dan deteksi dini kemacetan pembayaran. Aplikasi khusus dikembangkan untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran bagi hasil, sekaligus memudahkan mitra usaha dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan risiko dilakukan setiap tahun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk penyempurnaan strategi dan kebijakan pengelolaan risiko di masa depan. Pendekatan berbasis maqashid syariah digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pengelolaan risiko telah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat desa.

4. KESIMPULAN

Strategi berbasis syariah melalui sistem bagi hasil (mudharabah), jual beli amanah (murabahah), dan pengelolaan zakat produktif telah membangun ekosistem ekonomi desa yang berkeadilan dan inklusif, terbukti dari penurunan angka kemiskinan dari 25% menjadi 12% dalam tiga tahun. Dampak implementasi terlihat pada peningkatan kesejahteraan multidimensi: (a) di sektor riil dengan pertumbuhan 40% produktivitas pertanian dan perluasan UMKM syariah, (b) di bidang sosial melalui penurunan angka putus sekolah dan penguatan kohesi masyarakat, serta (c) di aspek spiritual dengan menguatnya kesadaran transaksi halal. Testimoni masyarakat seperti Ibu Siti yang pendapatannya meningkat 337% dan nelayan yang terbebas dari jeratan tengkulak membuktikan efektivitas model ini. Penelitian mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan: (1) integrasi nilai syariah dengan kearifan lokal, (2) kepemimpinan BUMDes yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas syariah, serta (3) kolaborasi antara ulama, akademisi, dan pemerintah daerah. Tantangan utama justru muncul saat sistem mulai berhasil, berupa upaya penyalahgunaan yang diantisipasi melalui pengawasan dewan syariah desa.

Temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa ekonomi syariah bukan sekadar alternatif sistem ekonomi, melainkan solusi holistik untuk pembangunan pedesaan. Keberhasilan Desa Sungai Putri menawarkan model replikasi bagi desa-desa lain dengan rekomendasi: (1) penguatan literasi keuangan syariah berbasis budaya lokal, (2) pengembangan fintech syariah pedesaan, dan (3) perluasan jaringan kemitraan halal antar-BUMDes. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa kesejahteraan sejati tercapai ketika kemajuan materiil berpadu dengan keberkahan transaksi yang sesuai prinsip Islam.

REFERENSI

- [1] Al-Harran, H., & Al-Qaradawi, Y. (2018). *Prinsip Ekonomi Syariah dan Aplikasinya dalam Dunia Usaha*. Jakarta: Penerbit Al-Hikmah
- [2] Suhaili, M. (2021). *Strategi Pengelolaan BUMDes Berbasis Ekonomi Syariah*. Bandung: Penerbit Aulia.
- [3] Hasan, A. (2019). *Analisis Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah: Studi Kasus di Desa Tertentu*. Yogyakarta: Penerbit Insan Cendekia.
- [4] Rahmawati, L. (2020). *Dampak Penerapan Ekonomi Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Sejahtera
- [5] Kurniawan, F. (2022). *Tantangan Implementasi Prinsip Syariah dalam BUMDes*. Jakarta: Penerbit Mitra Abadi.

- [6] Kamil, M., & Jannah, S. (2021). Efektivitas Pelatihan dalam Implementasi Prinsip Syariah di BUMDes. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 89-98.
- [7] Wibowo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah I. *Jurnal Pembangunan Desa*, 12(1), 75-86.
- [8] Adnan, N. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 18(3), 109-120.
- [9] Hariri, M., & Yani, E. (2021). Kerjasama Pengelola BUMDes dan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(2), 92-101.
- [10] Farhan, R. (2020). Penyesuaian Regulasi Lokal dalam Implementasi Ekonomi Syariah di BUMDes. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 13(4), 78-85.
- [11] Siti, N. (2022). Evaluasi Berkala dalam Implementasi Prinsip Syariah pada BUMDes. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 17(1), 95-105.